

**TESIS**

**KEPASTIAN HUKUM JANDA/DUDA YANG MENGAJUKAN  
DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Magister Kenotariatan*



**Disusun Oleh :**

**ANGGELA ANGGUN NUGRAH**

**NIM : 2220122068**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

# **KEPASTIAN HUKUM JANDA/DUDA YANG MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**(Anggela Anggun Nugrah, 2220122068, Magister Kenotariatan, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 93 Halaman, 2024)**

## **ABSTRAK**

Sebagai negara hukum, segala perbuatan manusia diatur dengan hukum. Hadirnya peraturan bertujuan agar terciptanya kepastian bagi masyarakat, salah satu bentuk aturan tersebut adalah UU Perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam dan Disdukcapil bagi selain Islam. Salah satu prinsip perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah pria dan wanita harus matang jiwa dan raganya, prinsip ini diperjelas dengan adanya Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun. Namun Pasal 7 ayat (2) menjelaskan adanya dispensasi kawin bagi yang belum berusia 19 tahun dengan cara mengajukan ke pengadilan. Mengenai dispensasi kawin, PA berpedoman kepada PERMA No.5 Tahun 2019 dan panduan KUA dalam pencatatan perkawinan adalah PMA No. 20 Tahun 2019. Semua aturan tersebut menyatakan bahwa penetapan dispensasi kawin adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang belum 19 tahun. Namun, terjadi kasus berupa penolakan perkawinan oleh KUA terhadap janda/duda yang yang berusia dibawah 19 tahun dan mengharuskan adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, padahal, di perkawinan sebelumnya janda/duda tersebut telah memperoleh penetapan. Faktanya janda/duda tersebut telah berstatus dewasa sehingga tidak diperlukan lagi dispensasi. Hal ini menjadi dasar Penulis melakukan penelitian mengenai kepastian hukum bagi janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin ditinjau dari UU Perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana kedudukan janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin? 2. Bagaimana kepastian hukum bagi janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, sumber data sekunder serta analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah 1. Hadirnya batasan usia agar menjamin kedewasaan para calon, janda/duda memiliki status dan kedudukan telah dewasa. Karena berdasarkan regulasi yang berlaku, telah adanya perkawinan membuat seseorang berstatus cakap hukum dan dewasa. 2. Tidak adanya perincian mengenai syarat status seseorang yang mengajukan dispensasi kawin dalam perundang-undangan menyebabkan perbedaan pandangan PA dan KUA dalam menerapkan aturan serta membuat ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin.

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, Janda/Duda, Dispensasi Kawin**

**LEGAL CONVICTION FOR WIDOWS AND WIDOWERS WHO APPLY  
MARRIAGE DISPENSATION VIEWED FROM THE LAW OF MARRIAGE  
ACT NO. 1 OF 1974**

*(Anggela Anggun Nugrah, 220122068, Master of Notary, Faculty of Law,  
Andalas University, 93 pages, 2024)*

**ABSTRACT**

*As a constitutional country, all people's action are regulated by law. The presence of laws aims to provide assurance for society. One of the laws is the Law of Marriage Act. Marriage is the physical and conjugal bond between man and women in purpose of building a family based on belief in one supreme God and it must be registered at the Religious Affairs Office for Muslims and at the Population and Civil Registration Agency for Non-Muslims. One of marriage principles that is regulated in the Law of Marriage Act is men and women must require physical and emotional maturity. This principle is defined by Article 7 Section 1 about the age limit for marriage which is nineteen years old. However, the Article 7 Section 2 explains the dispensation of marriage for those who are under nineteen years old by submitting a proposal to the court. About dispensation of marriage, the Religious Court is guided by the Supreme Court Act No. 5 of 2019 and the Religious Affairs Office's guidelines of stipulating the marriage dispensation is the Law of Ministry of Religious Affairs No. 20 of 2019. These regulations state that the stipulation of marriage dispensation is an obligated requirement that applicants who are under nineteen years old have to complete. Nevertheless, there are cases in which the Religious Affairs Office rejects marriage applications by widows and widowers who are under nineteen years old and it requires a stipulation of marriage dispensation by the court, meanwhile during the applicants' previous marriage, they have already obtained the dispensation. The widows and widowers are considered adults so the dispensation is no longer necessary. This case urges the writer to do a research about the legal conviction for widows and widowers who apply marriage dispensation viewed from the Law of Marriage Act. This research identifies these problems: (1) the legal standing for widows and widowers who propose marriage dispensation, and (2) the legal conviction for widows and widowers who propose marriage dispensation. The method of the research is normative juridical by using case study and legislative approach from secondary data and qualitative analysis. The results of this research are (1) the presence of age limit guarantees the maturity of widows and widowers, since the regulating laws claims that a marriage considers that someone is legally competent and mature, and (2) the non-existent details about the status of applicants' who propose marriage dispensation in regulations causes the difference of views between the Religious Court and the Religious Affairs Office in deciding the regulation and it makes a legal uncertainty for civilians, especially widows and widowers who propose marriage dispensation.*

**Keywords: Legal Conviction, Widows/Widowers, Marriage Dispensation**